



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REFIA HENDRITA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 146055

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/133 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 446 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 1029 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 77.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT X1B02N04L0 A/T / SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 82.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	420.604.022
F. HARTA LAINNYA	Rp.	180.000.000
Sub Total	Rp.	4.039.604.022
III. HUTANG	Rp.	70.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.969.604.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.